

LAPORAN AKHIR

HIBAH KOMPETITIF PENELITIAN SESUAI PRIORITAS NASIONAL

PENGENTASAN KEMISKINAN



MODEL KEMITRAAN RANTAI PASOKAN PERIKANAN TANGKAP RAKYAT

DALAM KOMODITI



Disusun oleh :

Dr. Ir. Suharno, M.Adev
Ir. Narni Farmayanti, M.Sc

DIBIYAI OLEH DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

SESUAI DENGAN SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN HIBAH KOMPETITIF PENELITIAN SESUAI PRIORITAS
NASIONAL BATCH II TAHUN ANGGARAN 2009 NOMOR: 343/SP2H/PP/DP2M/VI/2009 TANGGAL 16 JUNI 2009

PENDAHULUAN

FAKTA

- negara bahari terbesar di dunia
- memiliki 17.508 buah pulau
- luas laut sekitar 5,8 juta km²
- pantai sepanjang 81.000 km²

IRONI

- prevalensi kemiskinan masy pesisir yang mendiami 8.090 desa → 16,42 Juta jiwa → 28 % miskin
- Keadaan tdk berubah sejak 60 th yg lalu

pemikiran inovatif yang bisa mengentaskan kelompok nelayan dari kemiskinan

Perubahan Struktural pada sistem distribusi hasil perikanan tangkap

1. memperbaiki efisiensi sepanjang rantai nilai
2. meningkatkan daya saing sektoral,
3. perbaikan kesejahteraan *stakeholders*

model kelembagaan ekonomi yang tepat: yang sekaligus memiliki kapasitas distributif dan efisiensi

SCM

hipotesis bahwa upaya pengentasan kemiskinan masyarakat nelayan bisa dilakukan melalui perbaikan struktur ekonomi

Tujuan

Secara umum: Menghasilkan rekayasa kelembagaan sosial ekonomi bagi pengentasan nelayan dari kemiskinan.

Secara Khusus:

1. Mendiskripsikan kondisi sosial ekonomi nelayan, dari perspektif demografi dan tingkat kesejahteraan.
2. Menemukan MODEL kemitraan dalam rantai nilai berbasis pengelolaan rantai pasokan (*supply chain management, SCM model*) yang berkeadilan bagi nelayan tradisional perikanan rakyat.
3. Merumuskan model proto type pengentasan kemiskinan berbasis kemitraan dalam rantai nilai komoditi perikanan rakyat berbasis SCM model.

Perumusan Masalah

1. Bagaimana model pengelolaan rantai nilai komoditi perikanan tangkap rakyat yang efisien dan efektif ?
2. Bagaimana model pengelolaan rantai distribusi (nilai) hasil tangkap perikanan (SCM) bisa menjadi sarana pengentasan kemiskinan bagi masyarakat nelayan melalui pengelolaan pendapatan dan belanja nelayan sekaligus?

Keluaran

1. Rumusan Umum Model Kemitraan Rantai Pasokan Komoditi perikanan tangkap Rakyat.
2. Prototype model yang siap direplikasi

Model rantai pasokan komoditi perikanan rakyat → kesepakatan kerjasama segitiga berbasis pasar yang melibatkan :

1. masyarakat nelayan sebagai **produsen primer komoditi** perikanan tangkap dengan
2. para pedagang perantara yang terlibat dalam proses **penambahan nilai** dalam rantai pasokan komoditi perikanan tangkap dan
3. pemerintah sebagai **regulator**, mediator dan fasilitator bagi kedua belah pihak, disertai rincian komitmen dan tanggung jawab pada tiap pihak yang terlibat, untuk menjamin bahwa (1) masyarakat nelayan menerima bagian nilai (*fisher's share*) yang adil dari hasil tangkapannya (2) masyarakat nelayan bisa membelanjakan pendapatan dari hasil tangkapannya di sepanjang musim (3) pihak pedagang perantara bisa menjalankan fungsi penambahan nilai melalui berbagai kegiatan pemasaran secara adil
4. pihak pemerintah memberikan perlindungan dalam **penegakan kesepakatan**, fasilitasi teknik, informasi pasar dan modal bagi kedua belah pihak dan pada akhirnya (5) konsumen akhir mendaat jaminan komodity ikan yang berkualitas sehat dan harga yang memadai (*food safety in appropriate price*) .

Yang bisa diatasi dengan model ini:

eksploitasi yang menjadi salah satu sebab dari (1) kemiskinan nelayan, (2) gejala lebih tangkap (*over exploitation*) pada sumberdaya perikanan dan (3) kerugian konsumen karena mall praktek pedagang dalam penanganan ikan dan harga yang tinggi



Aspek – aspek yang akan tercakup dalam model ini adalah:

1. Pola pengadaan sarana produksi nelayan dan
2. Pola penjualan hasil tangkapan dari nelayan kepada pedagang perantara
3. Bimbingan teknik tentang pola penangkapan yang berkelanjutan
4. Penguatan kapasitas keluarga nelayan dalam pengadaan modal keluarga dan manajemen belanja bagi keluarga nelayan.
5. Penguatan kapasitas teknik dan permodalan pemasaran bagi pedagang perantara yang menjamin keamanan produk bagi konsumen.

Tiga issue yang dijawab oleh penelitian:

- (1) Issue distribusi (*distribution issues*),
- (2) issue tata kelola sumberdaya (*governance issues*) dan
- (3) issue perbaikan teknik pemasaran (*technical up grading issues*).



Inovasi yang diharapkan

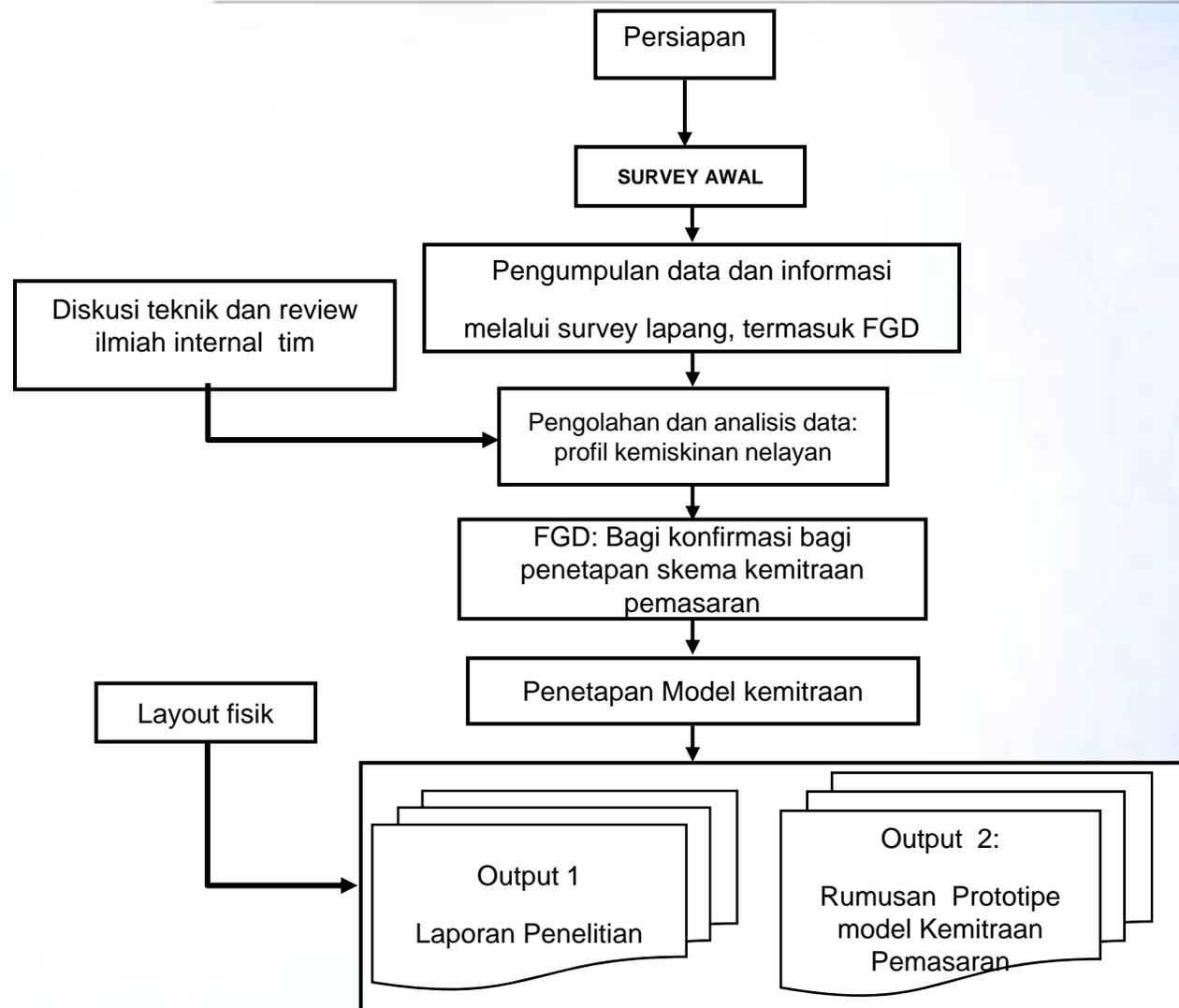
Model kemitraan ekonomi yang bisa menjamin tingkat insentif yang menyebar bagi semua stakeholder distribusi, sehingga akan dijamin bahwa kemitraan pemasaran yang diharapkan akan berkelanjutan.

Alasan keberhasilan:

Pertama, pembentukan kemitraan yang diusulkan akan dijalankan melalui proses partisipatory yang *genuine* dengan melibatkan secara substantial semua pihak yang terlibat.

Kedua, penerima manfaat dari model ini tidak semata nelayan tetapi juga pedagang perantara yang berkomitmen menjalankan praktik pemasaran yang etis.

Rencana Kegiatan



Supply Chain Management

adalah konsep yang dikembangkan untuk meningkatkan pelayanan penyerahan barang oleh berbagai aktor yang terlibat secara tepat kepada konsumen, dengan cara mensinkronkan aliran barang, informasi dan uang dalam satu pengelolaan

Perancangan SCM

Pertimbangan

- (1) kondisi distribusi riil di lapangan,
- (2) tujuan SCM untuk konteks perikanan rakyat,
- (3) kondisi sumberdaya manusia pendukung dan calon penerima manfaat,
- (4) kondisi sumberdaya pendukung dan
- (5) Pengalaman di tempat/ negara lain yang telah menerapkannya.

- Sifat pelaku bisnis di dalam distribusi hasil perikanan rakyat sebagian berskala kecil, dengan demikian tidak memiliki kapasitas untuk memulai. Mereka adalah pihak yang mengharapkan intervensi dari luar agar posisi mereka mendapat perbaikan.
- Sebagaimana ditunjukkan oleh studi distribusi hasil perikanan hingga saat ini, belum terlihat prakarsa dari pihak pindustri untuk memulai. Kecenderungan yang ada menunjukkan bahwa mereka lebih memilih status quo, karena keadaan ini memberi posisi tawar yang baik bagi mereka.

Alternatif pola SCM

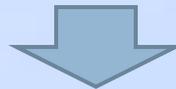
1. Pemerintah bertindak sebagai fasilitator dan agen yang terlibat langsung dalam sistem.
2. Pola kemitraan usaha : (*business to business partnership*) dengan awalan difasilitasi oleh pemerintah, tetapi pemerintah tidak terlibat secara operasional, tetapi tetap jadi regulator
3. Inisiatif perusahaan besar untuk membangun rantai pasokannya sendiri untuk menjamin bahwa layanan pelanggannya berjalan prima.

**POLA
PERTAMA**

SCM

pendekatan untuk menyelesaikan persoalan inefisiensi dan eksploitasi yang diakibatkan kegagalan pasar pada sub-sektor distribusi industri perikanan rakyat Indonesia

pendekatan ekonomi kelembagaan yang mengandalkan kesepakatan (*agreements*) sebagai pengganti mekanisme pasar dalam transaksi



enforcement cost → subsidi tak langsung pada sub-sektor distribusi hasil perikanan → keterlibatan pemerintah

Metode Penelitian

Penelitian tergolong sebagai kegiatan penelitian kelembagaan ekonomi (pemasaran) deskriptif dengan konsentrasi pada sistem distribusi komoditi dan produk perikanan, khususnya, hasil tangkapan

Metode Pengumpulan Data

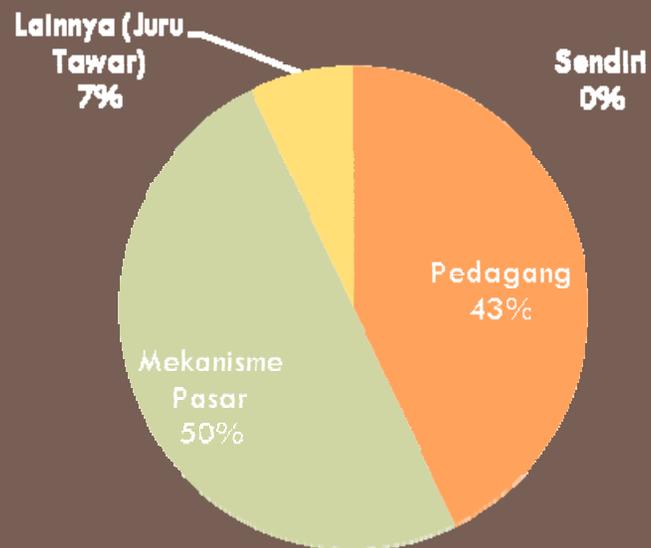
1. metode survey (wawancara terpandu dengan perorangan atau kelompok melalui kuesioner),
2. metode observasi (pengamatan dan pencatatan langsung peristiwa distribusi: penanganan, pengangkutan, penggudangan sementara, transaksi jual beli di berbagai tingkat pasar)
3. metode kualitatif (*in depth interview*, dan *focused group discussion* yang longgar dengan beberapa nara sumber).

Daftar Data Informasi dan Metode Pengumpulannya

NO	DATA DAN INFORMASI		SUMBER/ NARASUMBER	METODE PENGUMPULAN DATA YANG DIGUNAKAN		
	Primer	Sekunder		Survey	Observasi	Kualitatif
1	Harga		Nelayan, pedagang, restoran, rumah tangga	√	√	√
2	Biaya		Nelayan, pedagang	√	√	√
3		Undang-undang dan peraturan	Pemerintah, daerah, pusat BAPPEDA, BPS, Dis-KP	√		
4		Assosiasi	Assosiasi	√		√
	Sarana/prasarana		Instansi/publik		√	
5	Produksi		Nelayan	√	√	
6	Pengolahan		Pengolah, pedagang	√	√	
7	Pengangkutan		Pedagang	√	√	
8	Transaksi		Nelayan, pedagang, rumah tangga	√	√	
9	Penanganan distribusi		Pedagang	√	√	
10	Pengamanan		Pedagang	√	√	
11	Penilaian ahli					√

Beberapa Temuan: aspek pemasaran

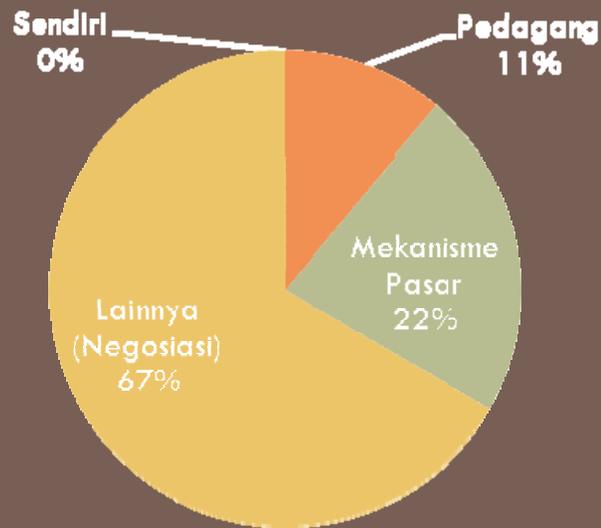
Penentuan Harga Jual hasil Tangkapan Ikan di Tingkat Nelayan



1. Tidak ada seorang nelayan pun yang menentukan harga jual hasil tangkapan secara independen

Beberapa Temuan: aspek pemasaran

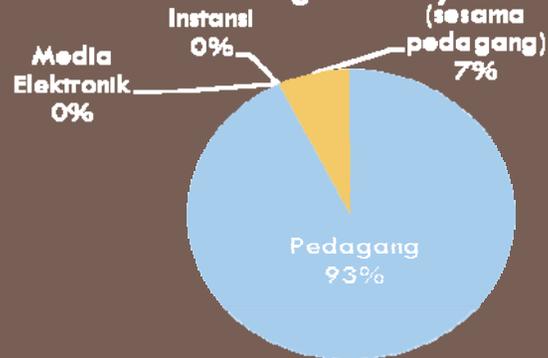
Penentuan Harga Beli Ikan di Tingkat Pedagang Pengumpul



2. Tidak ada seorang pedagang pengumpul yang menentukan harga beli ikan secara sepihak

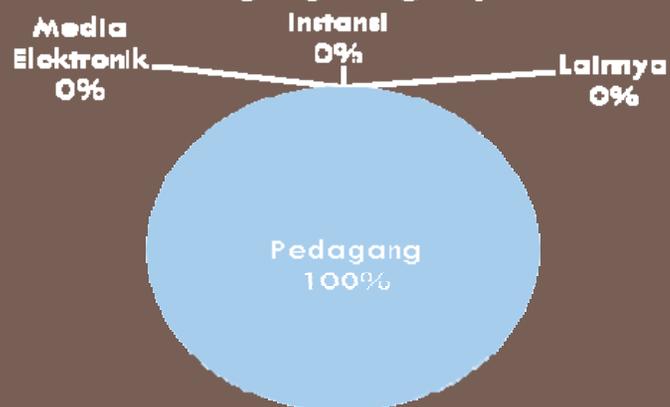
Beberapa Temuan: aspek pemasaran

Sumber Informasi Harga Jual Hasil Tangkapan di Tingkat Nelayannya



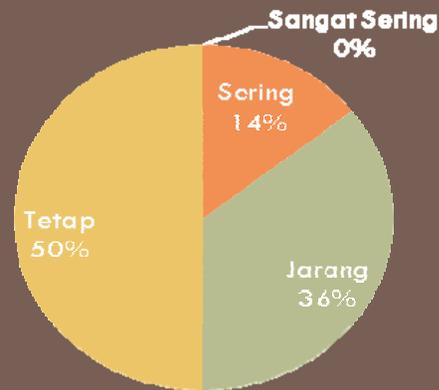
4. Informasi harga yang diperoleh nelayan dan pengumpul memiliki kesamaan, yaitu berasal dari pedagang di level yang lebih tinggi.

Sumber Informasi Harga Beli Ikan di Tingkat Pedagang Pengumpul

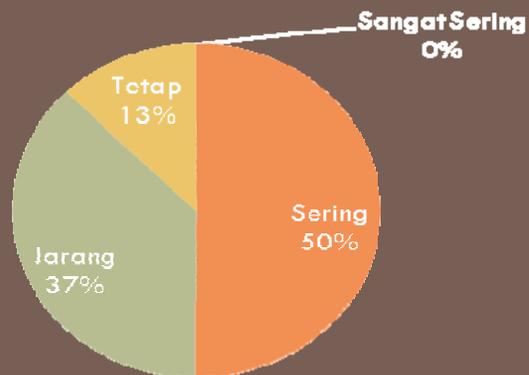


Beberapa Temuan: aspek pemasaran

Mobilitas Saluran Pemasaran di Tingkat Nelayan



Mobilitas Sumber komoditi Ikan di Tingkat Pedagang Pengumpul



5. intensitas mobilisasi penjualan dan pembelian hasil tangkapan tergolong sedang karena baik nelayan maupun pedagang pengumpul cenderung jarang melakukan perpindahan saluran pemasaran.

Beberapa Temuan: Pola Kemitraan dan Lembaga Keuangan

Bentuk Kerjasama Nelayan dengan Pembeli



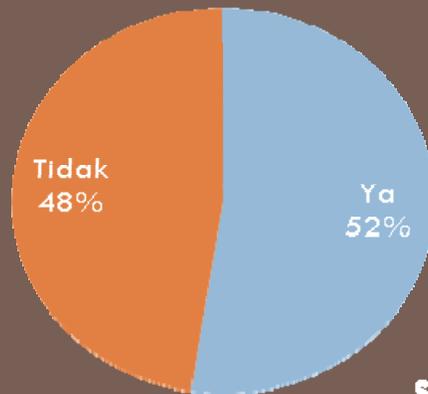
6. Hubungan kerjasama yang dijalin nelayan dengan pedagang cukup erat.

Keeratan Hubungan Kerjasama antara Nelayan dan Pembeli

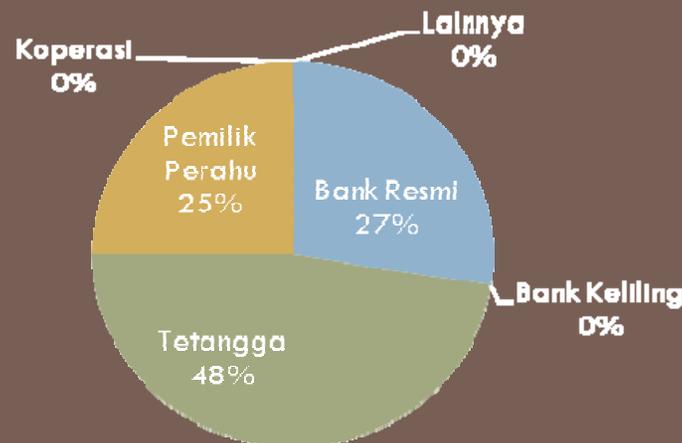


Beberapa Temuan: Pola Kemitraan dan Lembaga Keuangan

Peminjaman Dana oleh Nelayan



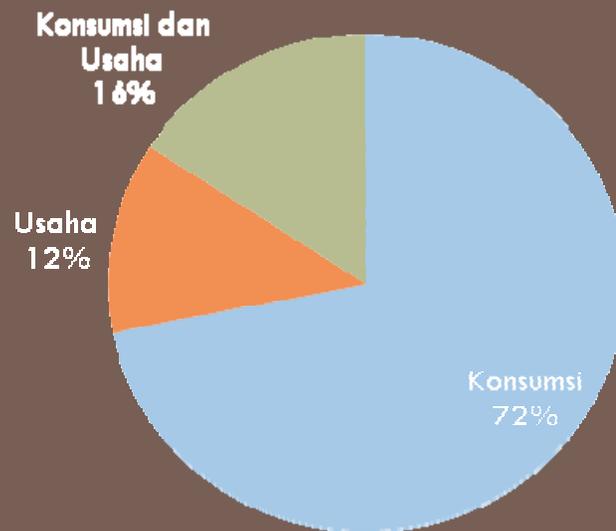
Sumber Dana Pinjaman



7. Peminjaman dana dilakukan oleh nelayan baik kepada lembaga ekonomi resmi maupun nonresmi. Akan tetapi, nelayan cenderung memilih lembaga nonresmi untuk meminjam dana, seperti tetangga dan pemilik perahu.

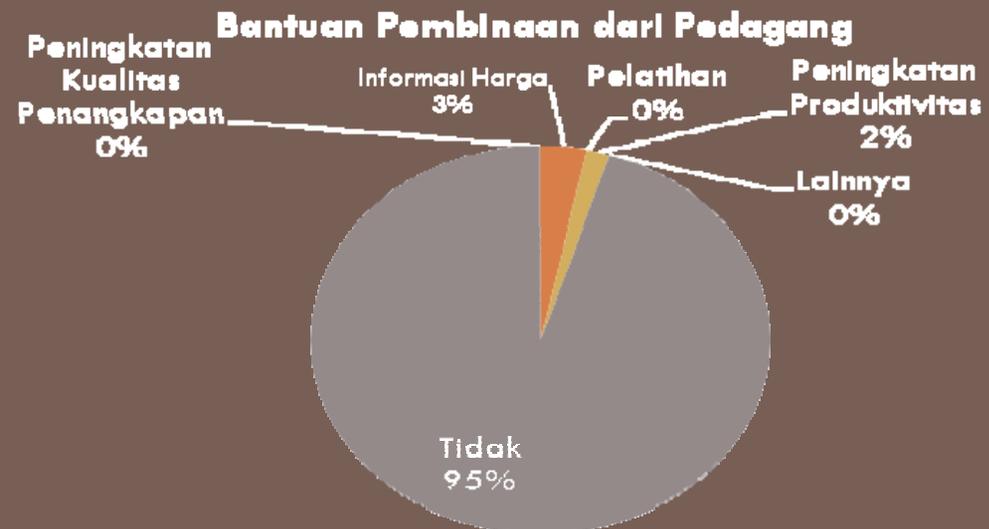
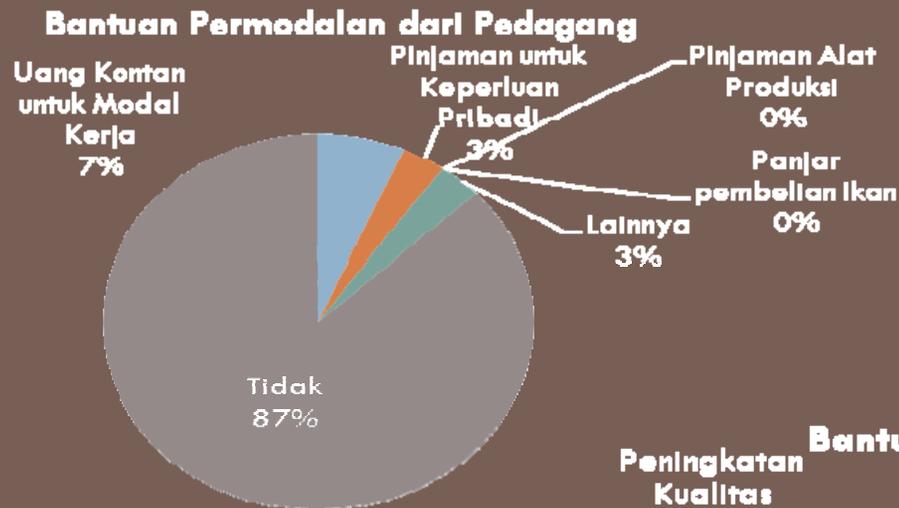
Beberapa Temuan: Pola Kemitraan dan Lembaga Keuangan

Penggunaan Dana Pinjaman



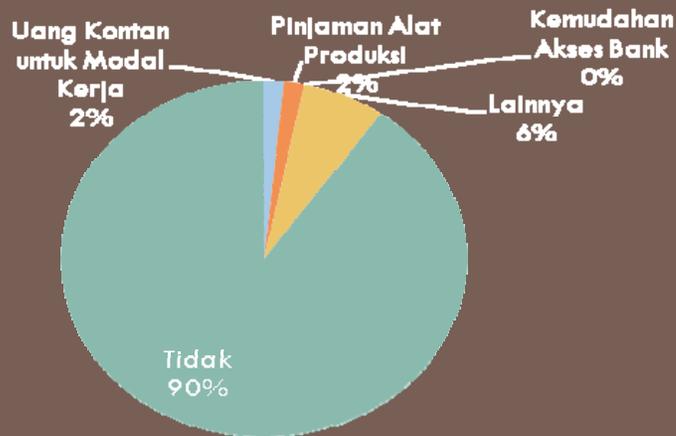
8. Mayoritas nelayan menggunakan dana pinjaman untuk keperluan konsumsi daripada untuk usaha.

Beberapa Temuan: Pola Kemitraan dan Lembaga Keuangan

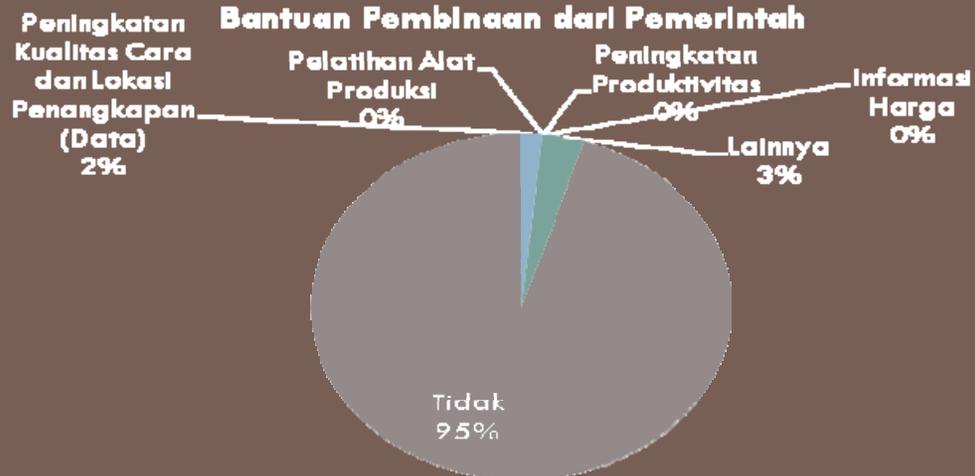


Beberapa Temuan: Pola Kemitraan dan Lembaga Keuangan

Bantuan Permodalan dari Pemerintah

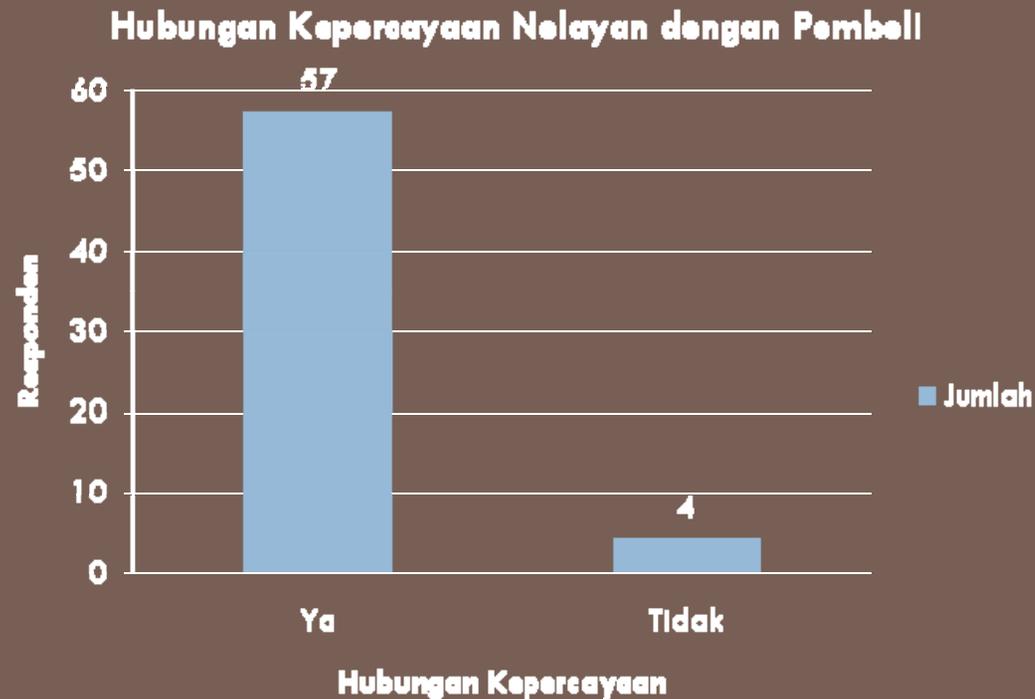


Bantuan Pembinaan dari Pemerintah

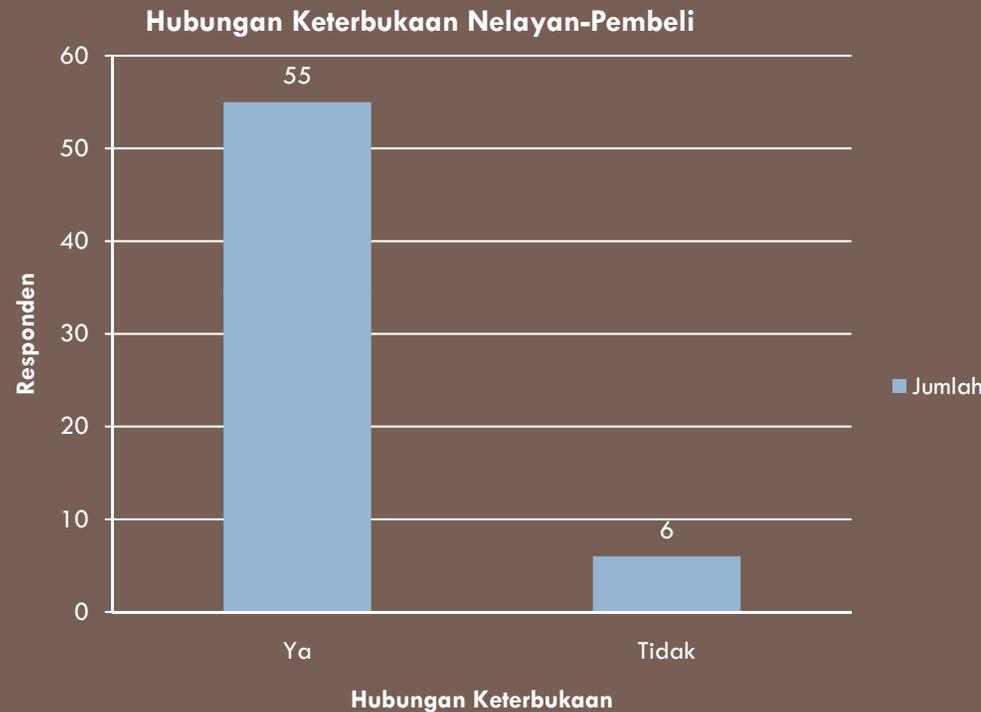


9. Nelayan menganggap kurang adanya bantuan dan pembinaan baik dari pedagang maupun pemerintah setempat. Beberapa reponden yang memperoleh bantuan dari pedagang dan pemerintah menggunakannya untuk modal kerja.

Beberapa Temuan: Pola Kemitraan dan Lembaga Keuangan



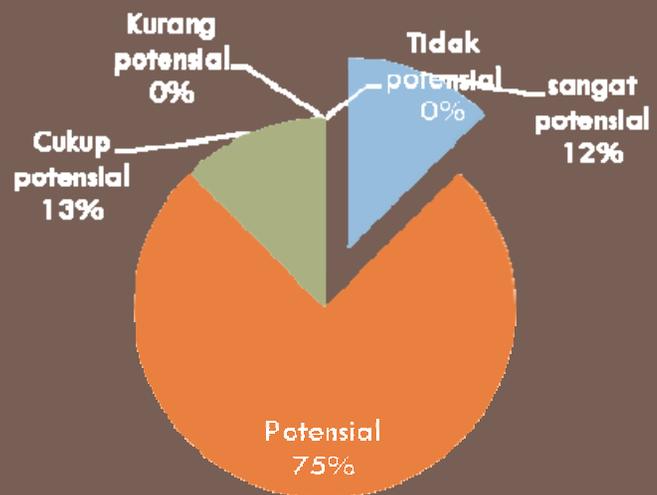
Beberapa Temuan: Pola Kemitraan dan Lembaga Keuangan



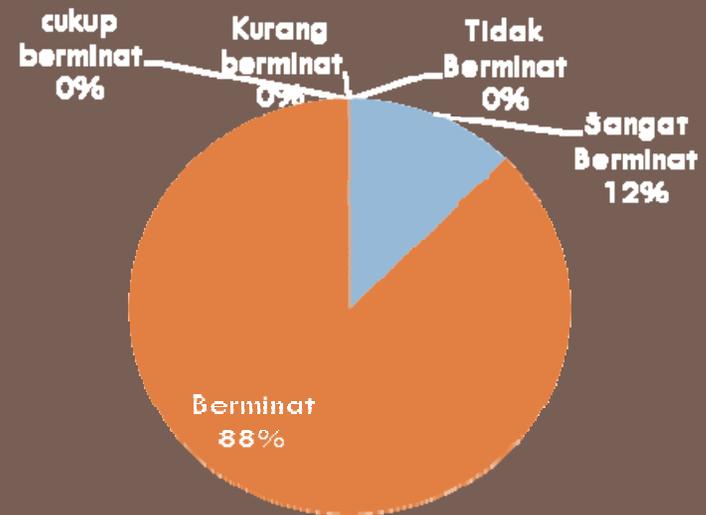
10. Kurangnya kerjasama antara nelayan dengan pedagang sangat disayangkan mengingat tingginya rasa kepercayaan dan keterbukaan nelayan dengan pedagang pengumpul. Peluang kemitraan yang dapat dibangun tidak hanya berkuat pada bidang pemasaran ikan, tetapi juga pembinaan mendalam untuk menunjang peningkatan kegiatan pemasaran

ANALISIS PELUANG KEMITRAAN RESPONDEN

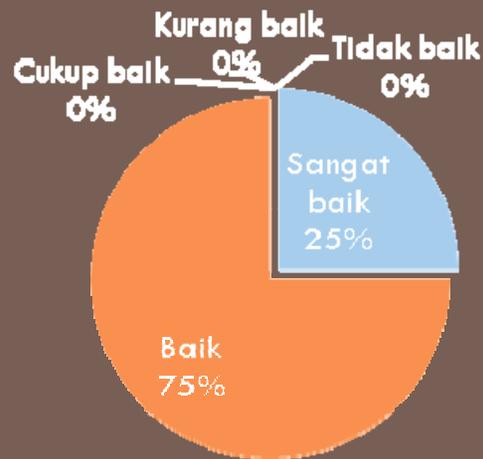
Potensi Mitra Usaha



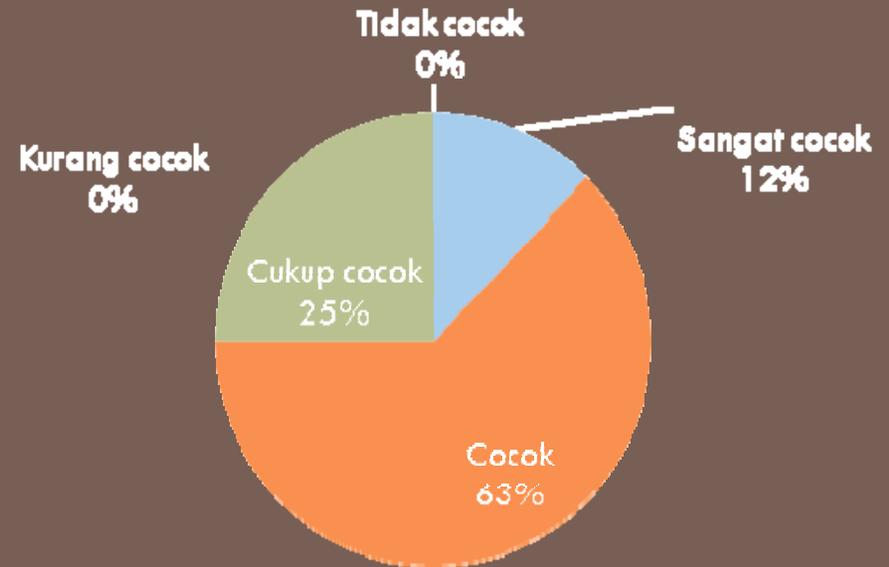
Minat mitra Bisnis



Tingkat Kepercayaan dengan Mitra Bisnis



Kesamaan Budaya Bisnis



Tabel 1. Rasio Pendapatan dan Pengeluaran Nelayan per bulan (September 2008 – Agustus 2009)

Kegiatan Penangkapan	Status Nelayan	Pendapatan Rp '000/bln	Pengeluaran Rp'000/bln	Rasio d/k
ODF	ABK	1,462	865	1.7
	Pemilik	1,809	1,051	2.1
NODF	ABK	1,886	1,001	1.9
	Nakhoda	9,038	2,431	3.7
	Pemilik	43,252	2,081	20,8

Garis Kemiskinan

BPS (2006) :

Kota dan kabupaten : < \$1,00/kap/hr

Bank Dunia : \$1,00 - \$2,00/kap/hr

Nilai tukar \$ 1,00 = Rp 9.300,00

Simpulan:

1. Dengan mendasarkan garis kemiskinan world bank (US \$ 2/kapita/orang), secara umum tidak dijumpai kemiskinan nelayan di desa Bajomulyo, namun ada prevalensi kemiskinan di Kecamatan Juwana.
2. Potensi kemiskinan tetap terjadi secara struktural , yaitu melalui pola belanja yang salah, misalnya terlalu banyak pembelian barang konsumsi, tidak investasi.
3. Ada potensi kemitraan antar pelaku

Rancangan Kemitraan Rantai Pasokan

1. Pihak Yang Bermitra:

- Tempat Pelelangan Ikan (prganisasi)
- KUD Mina (organisasi sosial ekonomi perikanan)
- Pemilik kapal
- Perwakilan anak buah kapal (asosiasi)
- Pedagang pengumpul
- Industri pengolahan (pindang, asap, asin, trasi dll) perorangan. Atau badang hukum
- Pihak penyandang dana (pribadi, swasta atau BUMD/BUMN)
- Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai pembina

Rancangan Kemitraan Rantai Pasokan

2. Ketentuan:

- TPI sebagai pelaksana lelang dan penjamin mutu fisik pasar lelang, penjamin arus tunai ABK dan pendega
- KUD MINO yang beranggotakan, nelayan pemilik, nelayan ABK, bakul dan pengolah yang menjamin pelaksanaan pembayaran cash kepada nelayan pemilik setelah pelelangan, terutama bagi pendega yang melelang ikannya.
- KUD MINO harus menjamin adanya informasi pasar bagi ikan hasil tangkapan yang bisa diakses secara transparan oleh para anggota.
- TPI dan KU MINO secara bersama harus menjamin bahwa nelayan pemilik mematuhi pola bagi hasil baru yang menjamin ABK mendapat jaminan hidup saat tidak melaut.

Rancangan Kemitraan Rantai Pasokan

2. Ketentuan

- Setiap peserta lelang (pembeli) yang ikut serta perlu menyerahkan agunan (caution) untuk menjamin bahwa yang bersangkutan berkomitmen untuk melakukan pembayaran cash.
- TPI perlu memastikan ketersediaan sarana penanganan ikan secara higienis, yang menjadi daya tarik nelayan untuk memasarkan ikannya di TPI.
- Untuk mendukung legitimasi diperlukan produk legislasi yang bisa memayungi secara hukum fungsi dan pendanaan peran TPI.
- Kemitraan memungkinkan peran serta penyandang dana untuk ikut serta dengan prinsip saling menguntungkan.
- Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai peran pembinaan yang dikuatkan dalam peraturan daerah kabupaten setempat.

KESIMPULAN

- ❑ Masyarakat nelayan di Juwana dibedakan dalam tiga strata sosial menurut kepemilikan, posisi dan fungsinya dalam proses pelayaran penangkapan: Pemilik kapal, 2. Nahkoda, 3. ABK
- ❑ Pendapatan ABK : Rp 890.000,00 - 1.700.000,00/bulan,
→ mencapai Rp 15.000.000,00/tahun.
- ❑ Pendapatan *pendega* berkisar Rp 540.000,00 - 3.250.000,00 per bulan
→ mencapai Rp 21.700.000,00/tahun.
- ❑ Pendapatan nahkoda berkisar Rp 7.000.000,00 - 11.000.000,00/bulan,
→ mencapai Rp 108.000.000,00/tahun.
- ❑ Pendapatan nelayan pemilik kapal besar: Rp 26.000.000,00 - Rp 59.000.000,00/bulan. → mencapai Rp 519.000.000,00/tahun

KESIMPULAN

- Pola belanja nelayan memungkinkan nelayan beresiko miskin → perlu pembinaan dalam manajemen belanja.
- Terdapat 4 jalur utama dlm rantai pasokan hasil perikanan tangkap:
 1. Pola-1 : nelayan → ke perusahaan pembekuan/penyimpanan dingin → eksportir.
 2. Pola-2 : nelayan → TPI → perusahaan penyimpanan dingin → ekspor.
 3. Pola-3 : nelayan → TPI → pengolah (pengasin, pemindang, pengasap, *fillet*) → pedagang distributor → pengecer (dalam atau di luar kota) → konsumen. besar →
 4. Pola-4 : nelayan → pengumpul → pedagang besar → distributor (ke dalam atau luar kota) → pengecer → konsumen

KESIMPULAN

Kinerja rantai pasokan yang melibatkan hasil perikanan tangkap di Juwana sedikit masih kurang efisien, (*fisher share* <50% dari total harga yang dibayarkan konsumen). → Sistem pengelolaan rantai pasokan yang ada belum mengakomodir kepentingan, terutama kepentingan ABK dan pendega.

Masyarakat nelayan di Juwana memerlukan MODEL kemitraan baru, atau hasil revitalisasi model yang ada dengan melibatkan kepentingan ABK dan pendega di luar pihak pihak yang dipandang sebagai mitra strategis dalam rantai pasokan yaitu:

- ❑ Tempat Pelelangan Ikan
- ❑ Nelayan pemilik
- ❑ Bakul (pedagang besar maupun kecil)
- ❑ Industri pengolahan
- ❑ Industri penyimpanan dingin
- ❑ KUD Saroni Mino
- ❑ Pihak penyandang dana dan penjamin mutu sanitasi tempat pelelangan ikan sebagai sarana pencapaian tinggi kualitas ikan.

SARAN

- Merevitalisasi pola kemitraan yang ada dibanding dengan menciptakan pola kerjasama baru.
- Di dalam model baru perlu dimasukkan skema pengelolaan belanja sebagai salah satu pra-syarat keikutsertaan dalam kemitraan
- Untuk lebih mengakomodir beberapa kepentingan dalam model diperlukan penambahan kewenangan dan peran KUD Mina serta TPI dalam rantai pasokan komoditi perikanan rakyat.